



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2021

Nomor : 131/966/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota Melalui Media *Teleconference* dan/atau *Video Conference*

Yth. Gubernur (daftar terlampir)
di-
TEMPAT

Berkenaan dengan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota melalui media *teleconference* dan/atau *video conference* pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
 - b. Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan".
 - c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Hal ini sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, menegaskan bahwa upaya Penanggulangan ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta beberapa petunjuk teknis diantaranya melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal tersebut disampaikan kepada Gubernur, dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat, dan sosialisasi dengan memanfaatkan media *teleconference* dan/atau *video conference*.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bagi Kabupaten/Kota yang akhir masa jabatannya:
 - a. Bulan Februari 2021 yang tidak ada sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bulan Februari 2021 yang terdapat sengketa perkara di Mahkamah Konstitusi namun terhadap sengketa tersebut telah diputuskan/ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15-16 Februari 2021 untuk tidak dilanjutkan perkaranya pada sidang berikutnya (ditolak); dan
 - c. Bulan Mei 2019 (Kota Makassar),terhadap daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota dilakukan oleh Gubernur pada minggu IV Bulan Februari 2021 secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
3. Sehubungan dengan ketentuan pada angka 2 huruf b di atas, diminta kepada Saudara Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mempercepat proses pengusulan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota agar dapat dilantik secara bersama-sama pada minggu IV Bulan Februari 2021.
4. Adapun pedoman dan tata cara pelaksanaan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota melalui media *teleconference* dan/atau *video conference* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



a.n. Menteri Dalam Negeri,
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

[Handwritten Signature]
Drs. Akmal Malik, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Pusat Penerangan, Setjen Kemendagri;
6. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Setjen Kemendagri;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (terlampir);
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (terlampir).

Lampiran I : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 131/966/OTDA
Tanggal : 15 Februari 2021

- 1) Maksud dan Tujuan pelaksanaan Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan melalui media elektronik/*teleconference*, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
 - b. Menghindari adanya kluster baru Pelantikan Pilkada 2020 serta memutus rantai penyebaran COVID-19.
 - c. Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota, khususnya pada masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona.
- 2) Pengaturan terkait pihak yang hadir dalam pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota oleh Gubernur adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang melantik hadir secara jarak jauh/virtual dan tetap berada di Ibu kota Provinsi;
 - b. Kelengkapan acara Pelantikan diantaranya Pembawa Acara, Pembaca Keputusan, Pembaca Do'a, dan/atau petugas protokol lainnya berada bersama dengan pejabat yang melantik;
 - c. Calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Wali kota/Wakil Wali kota yang akan dilantik hadir secara jarak jauh/virtual di Ibu kota Kabupaten/Kota masing-masing dan telah menggunakan pakaian dan atribut yang lengkap (PDUB) dengan didampingi Rohaniwan sesuai agama dan/atau kepercayaan dari calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Wali kota/Wakil Wali kota yang akan dilantik;
 - d. Berita Acara pengucapan Sumpah/Janji jabatan dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota terpilih setelah pelaksanaan pelantikan, agar dikirimkan ke Pemerintah Provinsi untuk ditandatangani oleh pejabat yang melantik; dan
 - e. Jumlah kehadiran para pihak secara fisik pada tempat/*venue* pelantikan di Kabupaten/Kota adalah paling banyak sejumlah 25 orang diantaranya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilantik, keluarga inti (suami/istri dan anak), kelengkapan acara, dan FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ketat.
- 3) Susunan acara pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:
 - a. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. Pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota;
 - c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh pejabat yang melantik;
 - d. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji dan Pakta Integritas;
 - e. Kata-kata pelantikan oleh pejabat yang melantik;
 - f. Sambutan Gubernur;
 - g. Pembacaan doa; dan
 - h. Penutupan.
- 4) Tahapan dan Persiapan pelaksanaan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota memperhatikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengecekan perlengkapan acara dan jaringan akan dilaksanakan H-7 serta menyiapkan *contact person* untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi;

- b. Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota yang akan dilantik, melaksanakan gladi resik pada H-3, dan H-1 serta menyiapkan *contact person* untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi;
- c. Pengecekan kehadiran peserta pelantikan yang akan dilantik secara virtual;
- d. Layar Utama/*Main Screen* digunakan untuk menampilkan pejabat yang melantik, calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Wali kota/Wakil Wali kota yang dilantik, dan rohaniwan;
- e. Rohaniwan mendampingi calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Wali kota/Wakil Wali kota pada saat mengucapkan kata-kata sumpah/janji, kalimat demi kalimat, mengikuti sumpah/janji yang diucapkan Pejabat yang melantik;
- f. Calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Wali kota/Wakil Wali kota yang dilantik atau diambil sumpah/janji yang hadir secara jarak jauh/*virtual* wajib mengucapkan kata-kata sumpah/janji, kalimat demi kalimat, mengikuti sumpah/janji yang diucapkan Pejabat yang melantik; dan
- g. Bunyi/lafal sumpah/janji, naskah pelantikan, berita acara pelantikan, dan hal lain terkait pelantikan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Wali kota/Wakil Wali kota, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran II : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 131/966/OTDA
Tanggal : 15 Februari 2021

GUBERNUR

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Riau
4. Kepulauan Riau
5. Jambi
6. Bengkulu
7. Sumatera Selatan
8. Kepulauan Bangka Belitung
9. Lampung
10. Banten
11. Jawa Barat
12. Jawa Tengah
13. D.I. Yogyakarta
14. Jawa Timur
15. Bali
16. Nusa Tenggara Barat
17. Nusa Tenggara Timur
18. Kalimantan Barat
19. Kalimantan Utara
20. Kalimantan Tengah
21. Kalimantan Timur
22. Kalimantan Selatan
23. Gorontalo
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Barat
27. Sulawesi Tenggara
28. Sulawesi Selatan
29. Maluku
30. Maluku Utara
31. Papua
32. Papua Barat

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko

15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma
17. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
18. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai
19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
20. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba
21. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
25. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
26. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis
27. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
28. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
29. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musirawas Utara
30. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
33. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan
34. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
35. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
36. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
37. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon
38. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
39. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi
40. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu
41. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang
42. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
43. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
44. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
45. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
46. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
47. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
48. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
49. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali
50. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
51. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
52. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
53. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo
54. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
55. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
56. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
57. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
58. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
59. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul
60. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
61. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
62. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
63. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
64. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar
65. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar
66. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo
67. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
68. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep

69. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan
70. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
71. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
72. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto
73. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek
74. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
75. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karang Asem
76. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
77. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan
78. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
79. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli
80. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana
81. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu
82. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram
83. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
84. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara
85. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur
86. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
87. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada
88. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
89. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua
90. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
91. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang
92. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
93. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi
94. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
95. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
96. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau
97. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda
98. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
99. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan
100. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung
101. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon
102. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara
103. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
104. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
105. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut
106. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
107. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros
108. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng
109. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja
110. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
111. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara
112. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
113. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara
114. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
115. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke
116. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom
117. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang
14. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
15. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko
16. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara
17. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
18. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai
19. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
20. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
21. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga
22. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
23. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
24. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
25. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai
26. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu
27. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
28. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
29. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara
30. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
31. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur
32. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan
33. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan
34. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
35. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro
36. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
37. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
38. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
39. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
40. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu
41. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang
42. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
43. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan
44. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
45. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
46. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
47. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
48. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
49. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali
50. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora
51. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
52. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
53. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
54. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
55. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
56. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
57. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemasang
58. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
59. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

60. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
61. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
62. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
63. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
64. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
65. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
66. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
67. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
68. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep
69. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan
70. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
71. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
72. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
73. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
74. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
75. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karang Asem
76. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
77. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
78. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
79. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli
80. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
81. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
82. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
83. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
84. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara
85. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
86. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
87. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
88. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
89. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
90. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
91. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang
92. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang
93. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
94. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
95. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser
96. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau
97. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
98. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
99. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
100. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung
101. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
102. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara
103. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
104. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
105. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut
106. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
107. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
108. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
109. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
110. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
111. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara
112. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur
113. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara
114. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
115. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
116. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
117. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak